



## Guru dan ASN Akan Terima Vaksin Booster Besok

**YOGYA. TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta segera memulai proses vaksinasi booster Covid-19 bagi para guru dan aparatur sipil negara (ASN) yang bergerak di bidang pelayanan publik, pada Jumat (21/1) mendatang.

Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menyampaikan, guru memang jadi prioritas setelah lansia, untuk mendukung pembelajaran tatap muka 100 persen yang direncanakan mulai 24 Januari 2022.

"Jumlah guru yang kita data ada sekitar 5 ribu. Kalau ASN, nanti dilakukan bertahap, tidak bisa langsung semua, untuk yang berhubungan dengan pelayanan publik dulu ya, terus yang lainnya menyusul," katanya, Rabu (19/1).

Menurutnya, meski sudah tuntas ter vaksin dua dosis, para tenaga kependidikan tetap harus mendapat booster supaya PTM secara penuh berjalan lancar. Terlebih, ketercapaian vaksinasi bagi anak 6-11 tahun sudah sangat tinggi.

"Sekarang sudah 107 persen capaiannya. Tapi, kita masih kejar terus itu karena target sarannya per sekolah, bukan berdasarkan data kependudukan saja," ucap Heroe.

"Jadi, vaksinasi untuk anak ini kita jalankan sampai tuntas betul, sampai 41 ribu, selaras jumlah murid usia 6-11 tahun. Kalau target Kemenkes kan cuma 29 ribu," lanjutnya.

Sementara itu, penyelenggaraan



TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

**MENINJAU IMUNISASI** - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, tengah berbincang dengan lansia peserta vaksinasi dosis ketiga di Museum Diponegoro, Rabu (19/1).

PTM di sekolah jenjang SMA/SMK yang ada di DI Yogyakarta telah berjalan lebih dari dua pekan. Disdikpora DIY mengklaim penegakan protokol kesehatan (prokes) telah diterapkan dengan baik selama proses pembelajaran.

"Minggu-minggu ini kita jalankan (PTM) dengan cukup baik prokesnya di sekolah," terang Kepala Disdikpora DIY, Didik Wardaya, Rabu (19/1).

Pihaknya juga mendorong sekolah untuk menerapkan aplikasi Peduli Lindungi. Sebab, hingga saat ini baru 30 persen sekolah jenjang SMA/SMK yang menerapkan aplikasi besutan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut.

Menurutnya, Kemenkes memang tergolong lambat dalam menerbitkan QR Code. Sehingga belum seluruh sekolah belum mengaplikasikan Peduli Lindungi. "Sekolah yang belum, pernah kita inventarisasi untuk mendapatkan data itu. Jadi memang yang proses pengajuan QR Peduli Lindungi masih banyak yang belum turun," bebernya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menambahkan, bagi sekolah yang kesulitan melaksanakan pengaturan jarak di kelas, direkomendasikan untuk menerapkan sistem shift. Sehingga tidak seluruh siswa datang ke sekolah secara bersamaan. **(tro)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005